



EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN GEMPA BUMI DI KABUPATEN PIDIE JAYA

THE FUNCTION EFFECTIVENESS OF REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY IN CONDUCTING EARTHQUAKE DISASTER MANAGEMENT IN PIDIE JAYA REGENCY

Muksalmina Fadri

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

M. Zuhri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan efektif atau tidaknya fungsi BPBD, mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan fungsi BPBD serta menjelaskan dan mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan BPBD dalam penanggulangan gempa bumi di Kabupaten Pidie Jaya. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa narasumber yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan fungsi BPBD dalam penanggulangan gempa bumi di Pidie Jaya belum efektif dikarenakan dalam melaksanakan fungsinya terkait pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi belum dilakukan secara tepat sasaran maupun tepat waktu. Hambatan yang dialami dilapangan yaitu sulitnya aksesibilitas lokasi bencana, masih ada oknum masyarakat yang tidak kooperatif dalam penanggulangan bencana dan koordinasi yang kurang menyatu antara para pihak penanggulangan bencana. Upaya yang dilakukan BPBD adalah Melakukan koordinasi sebaik mungkin dengan setiap instansi pelaksana penanggulangan bencana dan melakukan upaya pengurangan risiko bencana melalui rumah tahan gempa. Disarankan kepada BPBD agar lebih aktif mensosialisasikan tentang kebencanaan kepada masyarakat, melakukan pembinaan sebanyak satu bulan sekali, meningkatkan koordinasi dengan instansi-intsansi terkait penanggulangan bencana serta lebih berhati-hati dalam mengkalkulasikan jumlah dana bantuan dengan jumlah kerugian yang diterima agar dapat disalurkan dengan lebih baik.

Kata Kunci: Penanggulangan, koordinasi, bencana

Abstract - *The purpose of this thesis is to know and to explain the effectiveness of BPBD function, to know and to explain the inhibiting factors from the implementation of BPBD function and to explain and know what efforts are done by BPBD in the earthquake prevention in Pidie Jaya Regency. To obtain data in writing this thesis, conducted literature and field research. Library research is done by studying the legislation, textbooks and opinions of scholars related to the problems studied, while field research conducted by interviewing some relevant sources. The result of the research showed that the implementation of BPBD function in the earthquake prevention in Pidie Jaya is not effective because in carrying out its functions related to the fulfillment of basic needs of refugees has not done in the right target and on time. Obstacles faced in the field are the difficulty of the accessibility of the disaster sites, there are still unscrupulous people in disaster management and coordination that is less integrated between the disaster management parties. Efforts made by BPBD are to coordinate as well as possible with every disaster management executing agency and to conduct disaster risk reduction efforts through earthquake resistant houses. It is suggested to BPBD to be more active in disseminating disaster to the community, performing coaching once a month, improving coordination with disaster relief related institutions and more careful in calculating the amount of aid fund with the amount of losses received to be distributed better.*

Keywords: Management, coordination, disaster

PENDAHULUAN

Gempa bumi adalah suatu getaran yang biasanya akan dirasakan pada permukaan bumi yang terjadi karena gelombang seismik dari sumber gempa yang terdapat pada lapisan

kulit bumi.¹ Sejarah gempa di Indonesia cukup panjang. Apabila kita melihat peta sebaran sumber gempa dunia, wilayah Indonesia berlokasi di kawasan yang rawan gempa.²

Kerugian yang disebabkan oleh bencana alam sangat besar, sehingga dibutuhkan penanggulangan bencana yang baik. Upaya penanggulangan bencana dapat berupa kegiatan penanganan/ tanggap darurat. Kegiatan penanganan merupakan kegiatan yang dilakukan segera untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan bencana, mencakup kegiatan penyelamatan masyarakat terkena bencana, harta benda, evakuasi, serta pemulihan sarana prasarana sehingga dampak bencana alam dapat diminimalkan.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mewajibkan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang dan kepada harta bendanya. Pasal tersebut ingin menunjukkan bahwa di Indonesia dijamin adanya perlindungan terhadap warganya, maka dalam hal penanggulangan bencana terhadap gempa yang terjadi di Pidie Jaya pihak pemerintah daerah tersebutlah yang harus bertindak.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi dasar hukum Negara Indonesia dalam hal penanggulangan bencana. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya ancaman bencana alam serta mendorong kerjasama antara warga yang mana semua hal tersebut akan diatur secara terorganisir, terencana, dan terkoordinasi secara menyeluruh. Aturan tersebut lahir karena berawal dari banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia sehingga diperlukan suatu sistem yang teratur untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana alam di Indonesia.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam hal penanggulangan bencana”. Pasal tersebut mendeskripsikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab utama dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia Khususnya di Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Aceh.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan oleh pemerintah pusat. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan

¹ Farah Amelia, *Ensiklopedi Bencana*, Garasi House Of Book, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

²Sukandarrumidi, *Bencana Alama dan Bencana Anthropologene*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm.27.

kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Semua hal tersebut harus di rencanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya yaitu melalui Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan SOTK BPBD daerah Pidie Jaya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya mempunyai fungsi penting yang sangat berkaitan dengan tugas-tugas badan tersebut. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 9 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2010 yaitu:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- d. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan
- e. Pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pada tanggal 7 Desember 2016, sebuah gempa bumi berkekuatan 6,5 SR mengguncang Kabupaten Pidie Jaya pada pukul 05.03 WIB. Pusat gempa yang berada di daratan menyebabkan gempa bumi ini tidak menimbulkan tsunami. Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas menyatakan bahwa sekitar 30% wilayah pidie jaya terdampak kerusakan gempa ini. Dampak korban gempa bumi di Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari 97 orang meninggal dunia, 139 orang luka berat, 718 orang luka ringan, 43.529 mengungsi.³

Masa tanggap darurat pasca gempa 6,5 SR di Aceh terus dipercepat. Masa tanggap darurat tetap berlaku selama 14 hari sejak kejadian gempa yaitu 7-20 Desember 2016. Evaluasi penanganan terus dilakukan setiap hari dari masing-masing klaster nasional seperti

³[http://bpba.acehprov.go.id/data/LaporanHarian2018.12.16.diaksestanggal 31 Januari 2017.](http://bpba.acehprov.go.id/data/LaporanHarian2018.12.16.diaksestanggal%2031%20Januari%202017)

klaster penanganan pengungsi, kesehatan, logistik dan lainnya.⁴ Hal ini merupakan kewajiban negara untuk bertanggung jawab atas masyarakat dan daerah-daerahnya untuk menanggulangi bencana tersebut melalui perpanjangan tangan negara yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Pidie Jaya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang dibentuk sebagai unsur pembantu Bupati Pidie Jaya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para korban, pada kenyataannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya tidak melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan penanggulangan khususnya pemberian pemenuhan kebutuhan dasar terhadap korban yaitu terdapat korban pasca bencana yang tidak mendapat tempat hunian sementara dan bantuan berupa pangan dan sandang yang cukup. Tak hanya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya saja yang bermasalah, dari masyarakat juga terdapat permasalahan yaitu terdapat beberapa warga yang mengeluh meminta agar diberikan tempat hunian sementara, padahal warga tersebut sebenarnya tidak berhak mendapat tempat hunian sementara tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Namun menurut kebiasaan metode dapat dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan seperti suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melakukan prosedur.⁵ Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang memaksudkan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan, termasuk

⁴<http://www.bnpb.go.id/home/detail/3213/Penanganan-Darurat-Bencana-Gempa-Aceh-Dipercepat.diakses> tanggal 1 Februari 2017

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ketiga*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 5.

proses penegakannya, sehingga akan terungkap berbagai faktor dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat berguna bagi pembangunan sistem hukum dalam arti luas.⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Trienggadeng dan Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya yang terkena dampak langsung dari bencana gempa bumi pada tanggal 7 Desember 2016. Pengambilan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa ke dua lokasi tersebut merupakan lokasi dengan dampak terberat dari gempa dibanding Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Pidie Jaya serta mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Efektivitas Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pidie Jaya tersebut dalam menangani hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanggulangan.

3. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷ Populasi penelitian ini meliputi unsur pelaksana BPBD Pidie Jaya sebagai instansi yang berwenang dalam proses penanggulangan bencana, instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana di Pidie Jaya, serta masyarakat Pidie Jaya yang terkena dampak bencana gempa bumi.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi.⁸ Meskipun sampel hanya merupakan bagian dari populasi, kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu harus dapat menggambarkan dalam populasi.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁹ Teknik pengambilan data sampel ini didasarkan oleh pertimbangan tertentu, misalnya berat ringannya gempa yang terjadi di suatu daerah yang diteliti, banyak sedikitnya korban dalam suatu daerah, keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar.

⁶Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 119.

⁸ *Ibid*, hlm. 120.

⁹ *Ibid*, hlm. 126.

Terhadap data yang diperoleh akan dilakukan *editing* yaitu dengan memeriksa dan meneliti apakah keseluruhan data yang diperoleh peneliti telah memenuhi kriteria dan mampu dipertanggung jawabkan.¹⁰

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku teks, teori-teori, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data dengan mewancarai responden dan informan.

6. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan BPBD Pidie Jaya dalam melaksanakan penanganan penanggulangan bencana gempa bumi dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan bukan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan, melainkan atas dasar kualitas data yang terkumpul menurut peneliti.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Gempa Bumi di Kabupaten Pidie Jaya

Indonesia membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang handal. Sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia.

Sejak dikeluarkannya undang-undang ini dan dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Masyarakat dalam

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 64.

¹¹ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*, Suka Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 8.

hal ini berharap agar pelaksanaan penanggulangan bencana tidak dilakukan dengan sembarangan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.¹²

Kegiatan utama dalam fase tanggap darurat adalah pencarian, penyelamatan, dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, pelayanan kesehatan dan penampungan bagi para korban.¹³

Gempa bumi di Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 7 Desember 2016 berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Pidie Jaya. Khususnya bagi kecamatan-kecamatan yang mengalami dampak terberat seperti Meureudu dan Trienggadeng yang mana terdapat desa yang mengalami kerusakan 90% lebih. Tentu hal ini menarik semua kalangan, baik kalangan pemerintah, masyarakat maupun pihak asing turut membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dari pihak pemerintah yang turun langsung pada saat tanggap darurat antara lain adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya sendiri.¹⁴

Penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Pidie Jaya harus dilakukan secara cepat, tepat, efektif dan efisien karena dibutuhkan metode terbaik dalam penanggulangan bencana agar mampu meminimalisir penderitaan korban bencana di Pidie Jaya. Oleh karena hal tersebut seluruh masyarakat sangat berharap penanggulangan dilakukan dengan metode terbaik.

Pada hari kejadian bencana semua warga panik berlari-larian kesana kemari karena gempa yang dirasakan warga sangat berat sehingga semua warga banyak yang tidak sempat mnyelematkan dirinya. Ada juga warga yang tidak berhasil menyelamatkan keluarganya serta harta bendanya karena keadaan yang sudah sangat darurat.¹⁵

Zulkifli seorang korban yang berasal dari gampong Kuta Pangwa mengatakan bahwa guncangan gempa terjadi selama 20 detik, pada saat itu warga Kuta Pangwa enggan untuk kembali kerumah karena takut akan terjadinya gempa susulan.¹⁶

¹² Syamsul Maarif, *Pikiran dan Gagasan*, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, 2012, hlm. 75.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Fandi Irawan, Anggota Bidang Logistik Dinas Sosial, *Wawancara* tanggal 21 Juni 2017.

¹⁵ Ismail Hasan, Sekdes Gampong Paya, *Wawancara* tanggal 15 Juni 2017.

¹⁶ Zulkifli, Korban Bencana Gempa Bumi Kecamatan Trienggadeng, *Wawancara* tanggal 17 Februari 2017.

Kuta Pangwa yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Trienggadeng merupakan kawasan terparah terkena dampak bencana gempa bumi di banding daerah-daerah lain dikarenakan sekitar 90% lebih bangunan terkena langsung dampak gempa beserta jumlah korban meinggal dunia yaitu 15 orang. Kemudian disusul Kuta Meureudu di Kecamatan Meureudu dengan puluhan toko yang rusak dan rumah-rumah warga beserta korban meninggal sebanyak 22 orang.

Hari ke enam masa tanggap darurat jumlah pengungsi yang berasal dari Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 82.122 orang dan dari Kabupaten Bireun sebanyak 1.716. Di Pidie Jaya pengungsi tersebar di 120 titik, sedangkan di Bireun pengungsitersebar di 4 titik. Distribusi 82.122 orang pengungsi di Pidie Jaya adalah Kecamatan Meureudu 13.965 orang, Meurah Dua 11.391, Trianggadeng 18.512, Bandar Baru 14.209, Pante Raja 8.153, Bandar Dua 3.170, Ulim 9.763, dan Jangka Buaya 2.959 orang. Sedangkan 1.716 orang pengungsi di Bireun tersebar di Matang Menasah Blang 1.100 orang, Masjid Matang Jareung 13, Masjid Alghamamah 405, dan Masjid Kandang 198 orang. Sementara itu, Komandan Satgas Tanggap Darurat yang juga Bupati Pidie Jaya, Said Mulyadi mengatakan akan mencermati jumlah pengungsi yang terus bertambah. Pihaknya akan melakukan berbagai langkah untuk menghindari lonjakan pengungsi yang terus bertambah.¹⁷

Seorang korban yang berasal dari Gampong Paya Kecamatan Trienggadeng yaitu Zulkifli ismail menjelaskan bahwa kejadian gempa bumi di Pidie Jaya terjadi pada pukul 05.15 WIB yang menyebabkan rumah-rumah, bangunan, sarana maupun prasarana yang ada di kawasan tempat ia berada runtuh.¹⁸

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya telah melakukan beberapa tindakan terkait fungsinya, adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya pada masa tanggap darurat dan pascabencana adalah sebagai berikut:

- a. Memberitahukan dan Memerintahkan Setiap Dinas Terkait Melakukan Tugas dan Fungsinya Masing-masing.
- b. Pengiriman Tim Reaksi Cepat
- c. Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Sandang dan Non Pangan Sementara Masyarakat Korban Gempa Bumi

¹⁷<https://news.detik.com/berita/d-3369273/hari-keenam-tanggap-darurat-gempa-aceh-jumlah-pengungsi-terus-bertambah>, diakses tanggal 24 Juni 2017.

¹⁸ Zulkifli ismail, Korban Bencana Gempa Bumi Kecamatan Trienggadeng, *Wawancara* tanggal 13 Juni 2017.

- d. Pemenuhan Kebutuhan Tempat Penampungan Sementara Korban
- e. Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Terkena Bencana

2. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Akibat Gempa

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya terkait penanggulangan bencana gempa bumi di Pidie Jaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya sering mengalami berbagai hambatan. Faktor-faktor penghambat tersebut sering membuat Badan penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya kesulitan dalam penanggulangan bencana. Hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan menanggulangi bencana tersebut terhambat harus mampu di hadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya.

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya adalah:

- a. Sulitnya Aksesibilitas Lokasi Bencana
- b. Masih Ada Oknum Masyarakat Yang Tidak Mau Kooperatif Dalam Penanggulangan Bencana
- c. Koordinasi Yang Belum Menyatu Antara Para Pihak Penanggulangan Bencana

3. Upaya-upaya yang Dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya

- a. Berupaya Melakukan Koordinasi Yang Baik Dengan Setiap Instansi Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- b. Upaya Pengurangan Risiko Bencana Melalui Rumah Tahan Gempa

KESIMPULAN

Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya baik pada masa tanggap darurat maupun pasca bencana belum dilakukan dengan maksimal. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sudah disalurkan kepada masyarakat, namun belum efektif maupun efisien. Seharusnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya bertindak lebih cepat dan tepat dalam menanggulangi bencana agar tidak timbul korban yang lebih banyak.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya mengalami hambatan dalam penanggulangan bencana terkait pemberian pemenuhan kebutuhan dasar korban yaitu

sulitnya aksibilitas lokasi bencana, masih ada oknum masyarakat yang tidak kooperatif dalam penanggulangan bencana dan koordinasi yang kurang menyatu antara para pihak penanggulangan bencana.

Upaya-upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya adalah melakukan koordinasi sebaik mungkin dengan setiap instansi pelaksana penanggulangan bencana dan melakukan upaya pengurangan resiko bencana melalui rumah tahan gempa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*, Suka Media, Yogyakarta, 2015.
- Farah Amelia, *Ensiklopedi Bencana*, Garasi House of Book, Yogyakarta, 2009.
- Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Sukandarrumidi, *Bencana Alam dan Bencana Anthropogene*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Syamsul Maarif, *Isu Bencana Dalam Hubungan Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 4-5.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidie Jaya,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang pedoman dan Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

3. Sumber Website

BNPB<<http://www.bnpb.go.id/home/detail/3213/Penanganan-Darurat-Bencana-Gempa-Aceh-Dipercepat>>,[diakses 01/02/2017].

BPBA<<http://bpba.acehprov.go.id/data/Laporan%20Harian%2018.12.16.pdf>>[diakses 31/01/2017].

Detik<<https://news.detik.com/berita/d-3369273/hari-keenam-tanggap-darurat-gempa-aceh-jumlah-pengungsi-terus-bertambah>>, [diakses 24/06/2017].